

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN



Dedi Junaedi

Direktur Pengolahan & Pemasaran Hasil Perkebunan

**Diskusi Petani Sawit Menuju Keberlanjutan : Tantangan Membangun Ketertelusuran
di Tingkat Petani Swadaya**

Jakarta, 14 Desember 2020



**Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian**

<http://ditjenbun.pertanian.go.id>

PROFIL KELAPA SAWIT INDONESIA

Profil Industri



Padat karya

Lapangan Kerja



2019:

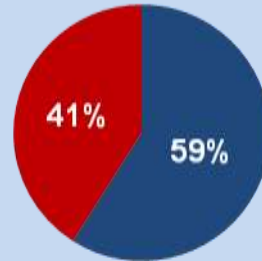
4,2 Juta

Lapangan Kerja
Langsung

12 Juta

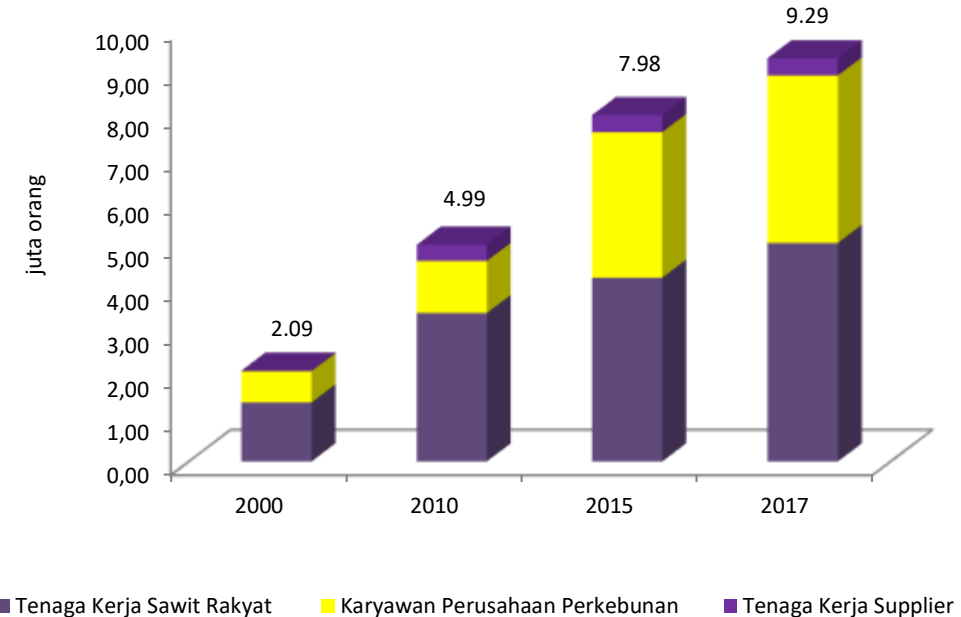
Lapangan Kerja Tak
Langsung

Lapangan Kerja Pertanian



■ Big Farmers ■ Smallholders

41% Petani Kecil
dengan **2,3 Juta**
lapangan kerja di bidang
pertanian yang menyerap
4,6 Juta pekerja



Sumber : PASPI

Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat bergantung pada industri sawit Indonesia. Pertumbuhan industri sawit akan berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat



Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian

<http://ditjenbun.pertanian.go.id>

LUAS AREAL DAN PRODUKSI KELAPA SAWIT BERDASARKAN STATUS PENGUSAHAAN (PERKEBUNAN RAKYAT, BESAR NEGARA DAN BESAR SWASTA) MENURUT PROVINSI

(ANGKA SEMENTARA TAHUN 2019)

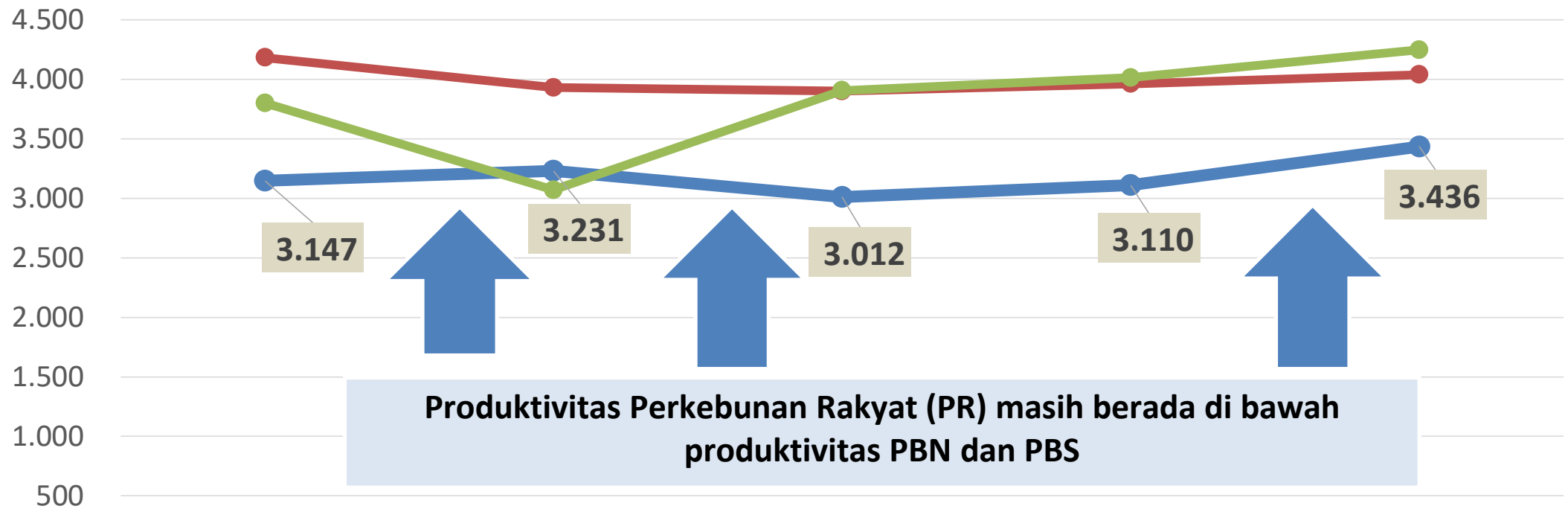
No	PROVINSI	STATUS PENGUSAHAAN			JUMLAH
		PR	PBN	PBS	
1.	A C E H	278.542	48.262	208.198	535.002
2.	SUMATERA UTARA	1.218.899	306.135	553.993	2.079.027
3.	SUMATERA BARAT	399.276	8.393	151.014	558.683
4.	R I A U	2.414.273	70.004	902.929	3.387.206
5.	KEPULAUAN RIAU	1.281	-	3.645	4.926
6.	J A M B I	754.207	20.014	360.419	1.134.640
7.	SUMATERA SELATAN	968.502	31.737	468.229	1.468.468
8.	KEP. BANGKA BELITUNG	119.007	-	154.835	273.842
9.	BENGKULU	322.858	829	102.821	426.508
10.	LAMPUNG	175.703	11.939	80.419	268.061
	SUMATERA	6.652.548	497.313	2.986.502	10.136.363
11.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-
12.	JAWA BARAT	304	11.174	3.519	14.997
13.	BANTEN	6.250	9.604	2.511	18.365
14.	JAWA TENGAH	-	-	-	-
15.	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-
16.	JAWA TIMUR	-	-	-	-
	JAWA	6.554	20.778	6.030	33.362
17.	B A L I	-	-	-	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-
	NUSA TENGGARA	-	-	-	-

No	PROVINSI	STATUS PENGUSAHAAN			JUMLAH
		PR	PBN	PBS	
20.	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	414.611	31.255	1.361.777	1.807.643
22.	KALIMANTAN SELATAN	304.745	-	1.473.957	1.778.702
23.	KALIMANTAN TIMUR	112.333	7.384	430.236	549.953
24.	KALIMANTAN UTARA	139.022	23.303	1.125.124	1.287.449
	KALIMANTAN	115.071	-	119.464	234.535
	KALIMANTAN	1.085.781	61.942	4.510.559	5.658.282
25.	SULAWESI UTARA	-	-	-	-
26.	GORONTALO	6.166	-	5.091	11.257
27.	SULAWESI TENGAH	27.646	-	83.255	110.901
28.	SULAWESI SELATAN	14.006	17.313	661	31.980
29.	SULAWESI BARAT	97.039	-	58.919	155.958
30.	SULAWESI TENGGARA	6.583	1.314	47.889	55.786
	SULAWESI	151.440	18.627	195.815	365.882
31.	M A L U K U	4.702	-	10.264	14.966
32.	MALUKU UTARA	3.950	-	-	3.950
33.	P A P U A	14.244	15.417	80.835	110.496
34.	PAPUA BARAT	24.716	-	33.940	58.656
	MALUKU + PAPUA	47.613	15.417	125.038	188.068
	I N D O N E S I A	7.943.936	614.077	7.823.944	16.381.957

CATATAN : Mengacu SK MENTAN NOMOR 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 ttg Data Luas Tutupan Perkebunan Sawit



PRODUKTIVITAS SAWIT 2014-2019*

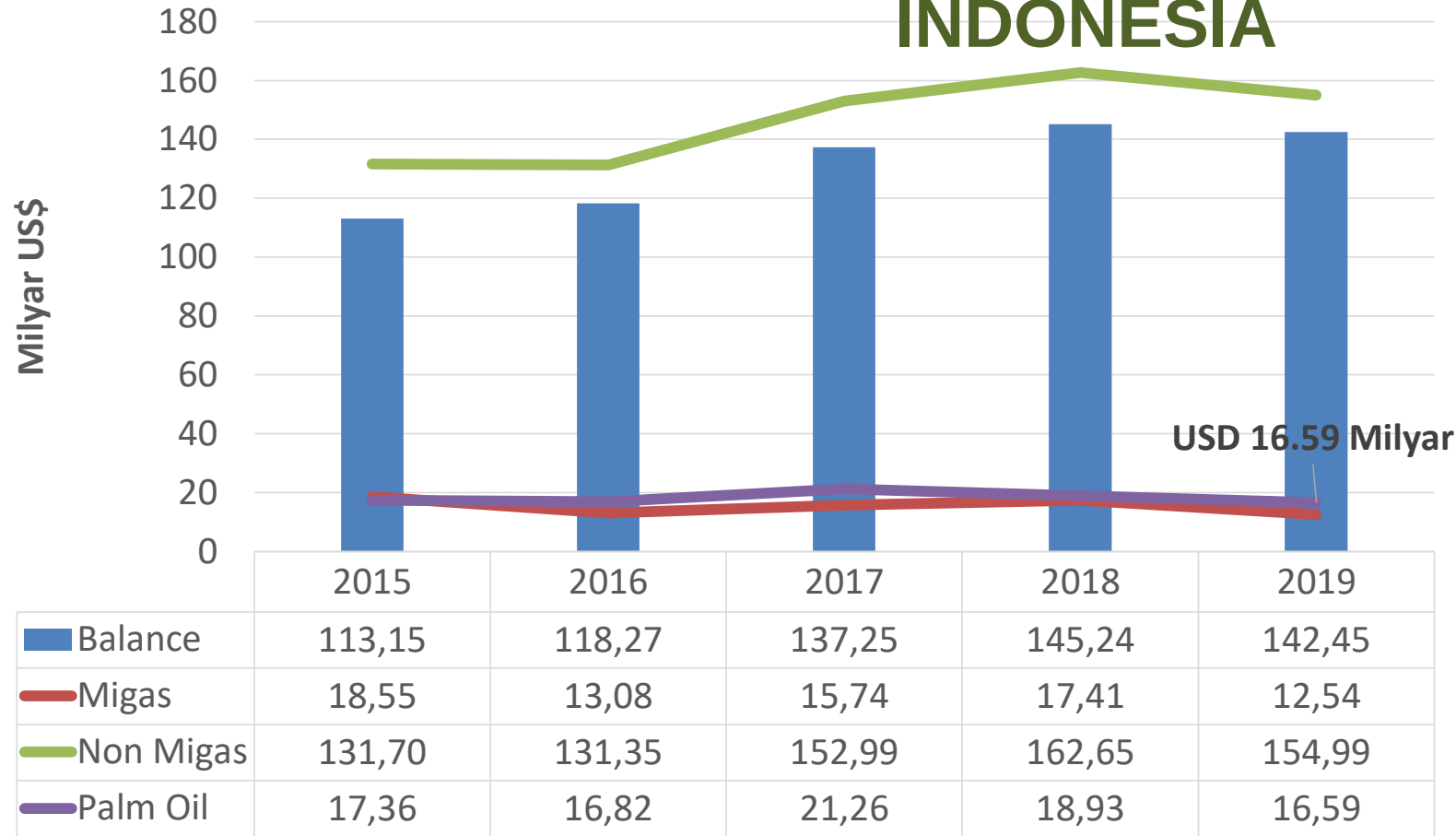


	2015	2016	2017	2018	2019
● Provititas PR (kg/ha)	3.147	3.231	3.012	3.110	3.436
● Provititas PBS (kg/ha)	4.183	3.931	3.901	3.963	4.039
● Provititas PBN (kg/ha)	3.802	3.070	3.907	4.014	4.248

*) Sumber: Ditjen. Perkebunan
tahun 2019 (Angka Sementara)

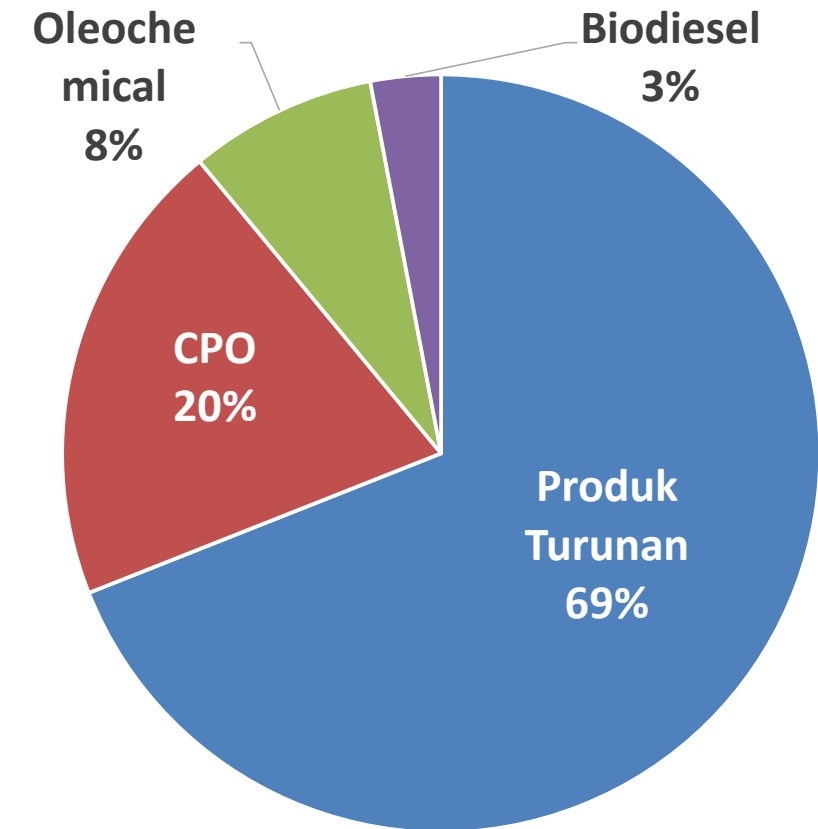


KONTRIBUSI SAWIT TERHADAP NERACA PERDAGANGAN INDONESIA



Sumber: BPS, diolah

HILIRISASI SAWIT



Ekspor produk sawit th 2019 : 16,59 Milyar US\$



TANTANGAN

Black Campaign

Masih adanya kampanye negatif terkait berbagai isu seperti deforestasi, isu lingkungan, sustainability, Kesehatan, Labelling “Palm Oil Free”, hingga isu pekerja anak, terutama di pasar Eropa



Produktivitas rendah (terutama pekebun)

Tanaman Tua/ rusak, terbatasnya penggunaan benih unggul, implementasi GAP dan SDM



Tata Kelola

Regulasi ISPO, aspek keberlanjutan, sarana prasarana & infrastruktur, Pembiayaan



Akses Pasar & Promosi

Hambatan Tariff & Non Tariff, standarisasi mutu produk/ branding



SOLUSI



PEREMAJAJAN SAWIT RAKYAT (PSR)

Target PSR 2017-2022

2017

20,780
Ha

2018

180,000
Ha

2019

180,000
Ha

2020

180,000
Ha

2021

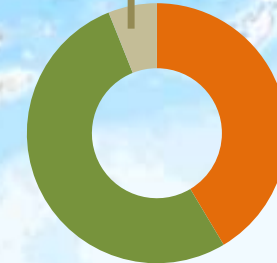
180,000
Ha

2022

180,000
Ha

- Luas Sawit Rakyat: **6,72** Ha
- Potensi PSR **2,78 juta** Ha
- Sebaran dominan di **Sumatera** dan **Kalimantan**

53%
Perusahaan
Swasta
8,68 Juta ha



6% BUMN
Pemerintah
0,98 Juta ha

41%
Rakyat
6,72 Juta ha

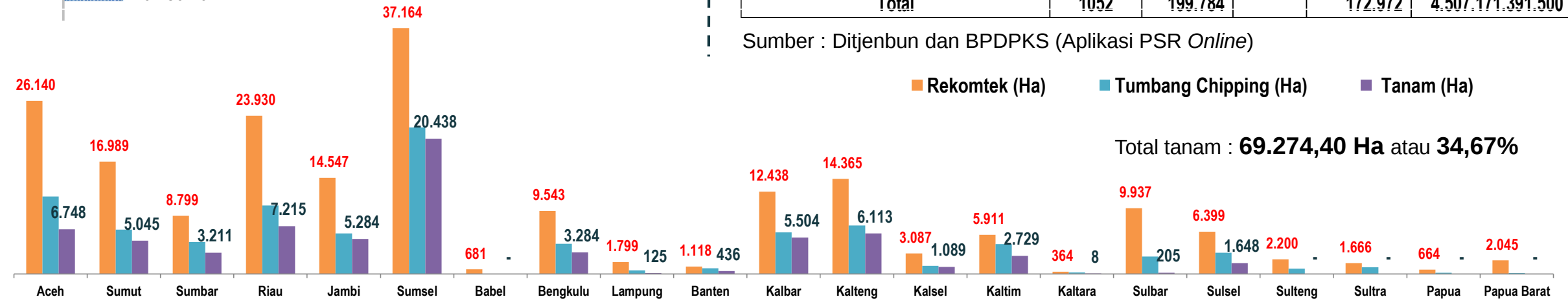
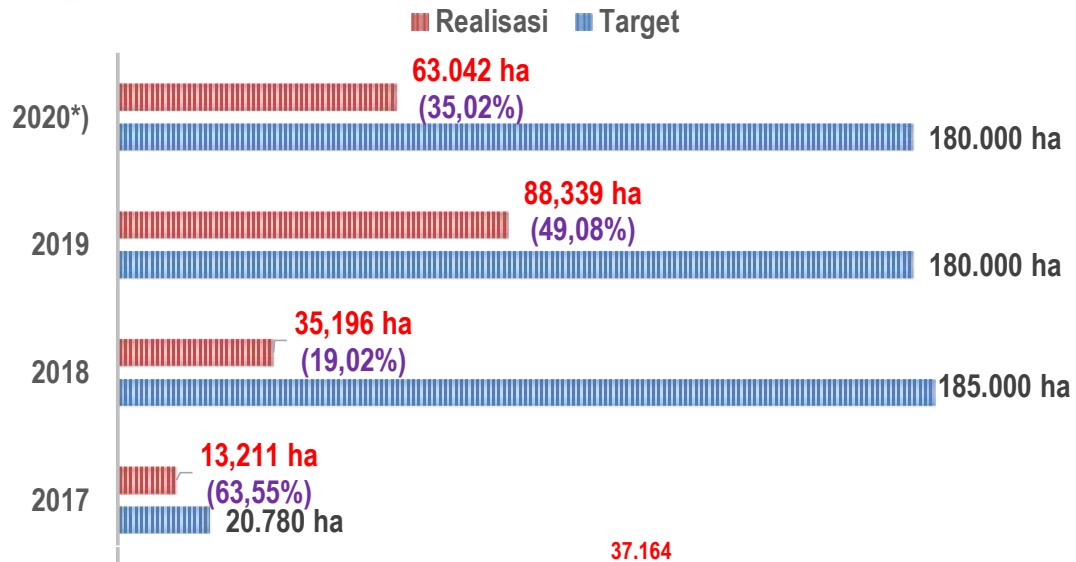
Total Luas Sawit : **16,38 Juta** ha
(Kepmentan 833/2019: Luas Tutupan Sawit)



REALISASI PSR 2017-2020



Target PSR dan Realisasi Rekomtek



*) Data sampai dengan 8 November 2020

2017-2020

- Realisasi rekomtek: **199.784 Ha**
- Realisasi transfer dana BPDPKS: **Rp4,5 triliun**

Tahun	Target (ha)	Prov dan Kab	Kop/ Gapoktan/ Poktan (unit)	Realisasi Rekomtek		Transfer Dana dari BPDPKS	
				(Ha)	(%)	Ha	Rp
2017	20.780	7 Prov / 20 Kab	41	13.206	63,55	13.130	328.009.877.500
2018	185.000	16 Prov / 45 Kab	175	35.196	19,02	34.616	865.403.352.500
2019	180.000	20 Prov / 79 Kab	503	88.339	49,08	88.331	2.208.070.305.000
2020*)	180.000	21 Prov/ 106 Kab	352	63.042	35,02	36.895	1.106.735.679.000
Total			1052	199.784		172.972	4.507.171.391.500

Sumber : Ditjenbun dan BPDPKS (Aplikasi PSR Online)

Total tanam : **69.274,40 Ha** atau **34,67%**





Inpres No. 8 Tahun 2018

Tanggal 20 September 2018 tentang Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit:

1. Menko Perekonomian;

2. Menteri LHK;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri ATR/BPN;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Kepala BKPM;

7. Para Gubernur;

8. Para Bupati/ Walikota.

1. Penyusunan dan verifikasi data dan peta IUP dan pendaftaran STDB beserta evaluasinya;

2. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% ;

3. NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;

4. Pembinaan kelembagaan petani sawit;

5. Intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit;

6. Menerapkan ISPO.



Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024



Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2019 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Tujuan Inpres

- **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;**
- **Penyelesaian status dan legalisasi lahan;**
- **Pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;**
- **Mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.**



KOMPONEN



**Penguatan data,
penguatan koordinasi,
dan infrastruktur**



**Melakukan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan**



**Meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas pekebun**



**Menerapkan tata kelola
perkebunan dan
penanganan sengketa**



**Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan
akses pasar produk kelapa sawit**



Inpres No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan



Terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, 118 keluaran.

→ Kementerian Pertanian bertanggung jawab pada 77 dari total 92 kegiatan



Ditugaskan kepada 14 Kementerian/Lembaga beserta Gubernur dan Bupati/ Walikota di 26 Provinsi penghasil kelapa sawit serta diperlukan keterlibatan dan dukungan para pemangku kepentingan lainnya (PS, CSO/NGO)



Telah terbentuk Forum Multipihak di Provinsi Riau, Sumut, Kalimantan Barat dan telah tersusun Rencana Aksi Provinsi sebagai turunan dari Inpres 6/2019 tentang RAN KSB atas fasilitasi SPOI-UNDP. Tahun 2021: fasilitasi di Provinsi Jambi.



Sumber pendanaan: APBN, APBD, Yayasan Nirlaba, Perusahaan Kelapa Sawit, Sumber-sumber lain yang sah.



Program dalam RAN KSB

Penguatan data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur



1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik
2. Pembinaan penyelenggaraan IGT tutupan kebun kelapa sawit.
3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Peningkatan sinergitas antar Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit
5. Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota penghasil kelapa sawit
6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit
7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun



1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*)
3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun
4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun
5. Peningkatan Penyuluhan pertanian di Kawasan sentra produksi Kelapa Sawit



Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan



1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan
2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan.
4. MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit.
5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit
6. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi
7. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi

Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa



1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat
2. Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan APL.
3. Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan.
4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.
5. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut.
6. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem K3 dan Jamsostek.

Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit



1. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional
2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun
3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi untuk keberterimaan sistem ISPO oleh pasar Internasional



A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

- Keputusan Menteri Pertanian No. 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019, seluas 16.381.959 ha. Saat ini sedang diproses data tematik berdasarkan kepemilikan (PBN/PBS, PR); umur tanaman (TBM, TM, TR), dan tumpang tindih dengan kawasan hutan.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024
- Sosialisasi Inpres No. 6 Tahun 2019 kepada Bappeda dan Dinas yang membidangi perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Terbitnya Peraturan Gubernur/Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Sintang



- Sosialisasi program kemitraan antara produsen benih yang memiliki kebun sumber benih, produsen benih yang membesarkan benih dan/atau BUMN perkebunan dihadiri oleh 21 provinsi.
- Terbitnya Permentan No. 07 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Kpts/SM.200/I/11/2020 tentang “Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani.
- Terbitnya Permentan Nomor 38 Tahun 2020 ttg Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (diundangkan tgl 24 November 2020)



KINERJA SERTIFIKASI ISPO
(Permentan 11 tahun 2015)
Per Maret 2020

Pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO 803 :

- **785 Perusahaan**
- **11 KUD/KSU Kebun Plasma**
- **1 Bumdes**
- **6 Koperasi/Asosiasi Kebun**

621

Sertifikat ISPO

- Luas areal : **5.450.329 Ha atau 38%** dari total luas kebun sawit 14,33 juta Ha,
- Produksi TBS : **60.266.557 ton/th, Produksi CPO 13.003.424 ton/th** atau **34,4%** dari total produksi CPO 37,8 juta ton/th,
- Produktivitas **18,96 ton/ha** dan rendemen rata-rata **24,45%.**

- PBS : **557 sertifikat dengan luas areal 5.151.481 Ha**
- PBN : **50 sertifikat dengan luas areal 286.590 Ha, dan**
- PR : **14 koperasi plasma dan swadaya seluas 12.270 Ha)**

58 Sertifikat

Transisi ISPO (Pasca Perpres 44/2020)

- PBS : **52 sertifikat**
- PBN : **3 sertifikat**
- PR : **3 sertifikat**



CAPAIAN STDB

Rekapitulasi STDB Perkebunan Tahun 2019



- 1 Aceh
- 2 Sumatera Utara
- 3 Sumatera Barat
- 4 Riau
- 5 Kepulauan Riau
- 6 Jambi
- 7 Sumatera Selatan
- 8 Kep. Bangka Belitung
- 9 Bengkulu
- 10 Lampung
- 11 Jawa Barat
- 12 Banten
- 13 Jawa Tengah
- 14 DI Yogyakarta
- 15 Jawa Timur
- 16 Bali
- 17 Nusa Tenggara Timur
- 18 Nusa Tenggara Barat
- 19 Kalimantan Barat
- 20 Kalimantan Tengah
- 21 Kalimantan Selatan
- 22 Kalimantan Timur
- 23 Kalimantan Utara
- 24 Sulawesi Utara
- 25 Gorontalo
- 26 Sulawesi Tengah
- 27 Sulawesi Selatan
- 28 Sulawesi Barat
- 29 Sulawesi Tenggara
- 30 Maluku
- 31 Maluku Utara
- 32 Papua
- 33 Papua Barat
- 33 TOTAL

<http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Rekapitulasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan S/d 2019

No	Provinsi	STDB		Luas Total Perkebunan Rakyat (Ha)	Persentase (%)
		Jumlah	Luas (Ha)		
1	Aceh	-	-	687.604,00	0,00
2	Sumatera Utara	325	1.193,07	911.709,00	0,13
3	Sumatera Barat	-	-	632.441,00	0,00
4	Riau	1	2,00	2.239.679,00	0,0001
5	Kepulauan Riau	-	-	77.493,00	0,00
6	Jambi	1.100	2.907,27	976.603,00	0,30
7	Sumatera Selatan	-	-	1.562.728,00	0,00
8	Kep. Bangka Belitung	82	142,62	169.009,00	0,08
9	Bengkulu	-	-	384.839,00	0,00
10	Lampung	1.463	1.850,65	648.103,00	0,29
11	Jawa Barat	57	136,00	329.740,00	0,04
12	Banten	-	-	125.985,00	0,00
13	Jawa Tengah	-	-	461.906,00	0,00
14	DI Yogyakarta	-	-	71.186,00	0,00
15	Jawa Timur	-	-	767.761,00	0,00
16	Bali	-	-	149.113,00	0,00
17	Nusa Tenggara Timur	-	-	162.678,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	444.914,00	0,00
19	Kalimantan Barat	1.977	18.462,30	871.233,00	2,12
20	Kalimantan Tengah	406	472,85	451.603,00	0,10
21	Kalimantan Selatan	1.380	2.780,04	292.069,00	0,95
22	Kalimantan Timur	-	-	348.468,00	0,00
23	Kalimantan Utara	-	-	37.458,00	0,00
24	Sulawesi Utara	-	-	386.560,00	0,00
25	Gorontalo	-	-	103.565,00	0,00
26	Sulawesi Tengah	-	-	689.385,00	0,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	595.554,00	0,00
28	Sulawesi Barat	526	740,48	276.314,00	0,27
29	Sulawesi Tenggara	-	-	502.309,00	0,00
30	Maluku	-	-	254.550,00	0,00
31	Maluku Utara	-	-	324.240,00	0,00
32	Papua	-	-	128.708,00	0,00
33	Papua Barat	-	-	60.207,00	0,00
TOTAL		7.317	28.687,28	16.125.732,00	0,18

Sertifikat ISPO Pasca Perpres 44 Tahun 2020

Penerbitan Sertifikat ISPO masa transisi pasca Perpres 44 Tahun 2020				
No	Nama Perusahaan	LS ISPO		
1	PT Arta Prigel	PT Mutuagung Lestari	30	PT Sumber Kharisma Persada
2	PT Kapuas Rimba Sejahtera	PT Mutuagung Lestari	31	PT Dharma Satya Nusantara, Tbk- PKS 2
3	PT Agrina Sawit Perdana	PT Mutuagung Lestari	32	PT Perkebunan Nusantara II
4	PT Incasi Raya Pangian	PT Mutuagung Lestari	33	PT Bangkitgiat Usaha Mandiri
5	PT Budidaya Agro Lestari	PT Mutuagung Lestari	34	PT Nalapalma Cadudasa
6	PT Perdana Sawit Plantation	PT Mutuagung Lestari	35	PT Pundi Lahan Khatulistiwa
7	PT Tebo Indah	PT Mutuagung Lestari	36	PT Perdana Inti Sawit Perkasa
8	PT Paja Pinang	PT Mutuagung Lestari	37	PT Subur Arum Makmur
9	PT Hasratjipta	PT Mutuagung Lestari	38	PT Panca Surya Agrindo
10	PT Kresna Duta Agroindo-Pelakar Mill	PT Mutuagung Lestari	39	PT Borneo Indah Marjaya
11	PT Sembada Sennah (RS)	PT Mutuagung Lestari	40	PT Trieika Agro Nusantara
12	PT Pangkatan Indonesia (RS)	PT Mutuagung Lestari	41	PT Sawit Multi Utama
13	PT Bilah Platindo (RS)	PT Mutuagung Lestari	42	PT Tanjung Sawit Abadi
14	PT Abdi Budi Mulia	PT Mutuagung Lestari	43	PT Indotruba Tengah
15	PT Perkebunan Nusantara IV-Sawit Langkat (Re-Audit)	PT Mutuagung Lestari	44	PT Maju Kalimantan Hadapan
16	PT AMP Plantation (RS)	PT Mutuagung Lestari	45	PT Golden Blossom Sumatera
17	PT Adei Plantation & Industry - Mandau Mill (RS)	PT Mutuagung Lestari	46	PT HAMITA UTAMA KARSA
18	PT NV Perimex	PT Mutuagung Lestari	47	PT Pasangkayu
19	PT Perkebunan Nusantara III-Torgamba	PT Mutuagung Lestari	48	PT Buana Wira Lestari Mas-Indrasakti
20	PT Perkebunan Nusantara III-Sei Daun	PT Mutuagung Lestari	49	PT Meganusa Intisawit
21	PT Agrindo Indah Persada 1	PT MISB	50	PT Agrowiyana
22	PT Pundi Agro Makmur	PT MISB	51	PT Kruing Lestari Jaya
23	PT Pinang Witmas Abadi	PT MISB	52	PT Satya Kisma Usaha
24	PT Sungai Bahar Pasifik Utama	PT MISB	53	PT Sumber Indah Perkasa PKS Sungai Merah
25	PT Nusantara 7 unit Sunge Legi	PT MISB	54	PT Sumber Indah Perkasa PKS Sungai Buaya
26	Kop. Petani Kelapa Sawit Kesepakatan	PT MISB	55	PT Tapan Nadenggan
27	Gapoktan Catur Manunggal	PT MISB	56	PT Agro Mitra Madani
28	PT Agrindo Indah Persada 2	PT MISB	57	PT Inti Agro Makmur
29	PT Dharma Wungu Guna	PT MISB	58	KUD Teratai Biru
				PT TUV Rheinland Indonesia
				PT TUV Rheinland Indonesia
				PT Sucofindo
				PT Sucofindo
				PT Sucofindo
				PT Sucofindo
				PT TAFE
				PT Mutu Hijau Indonesia
				PT Mutu Hijau Indonesia
				PT Mutu Hijau Indonesia
				PT Mutu Hijau Indonesia
				PT SGS
				PT SGS
				PT SGS
				PT SGS
				PT AJA
				PT AJA
				PT AJA
				PT Mutuagung Lestari
				PT Mutuagung Lestari
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT BVI
				PT TUV Rheinland Indonesia



PERMENTAN 38 TAHUN 2020

Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia



Wajib (perusahaan perkebunan) dan pekebun (5 th setelah diundangkan)



Kelembagaan ISPO melibatkan pemangku kepentingan/masyarakat



Pembinaan/pengawasan pelaksanaan sertifikasi lebih efektif

Penerbitan Sertifikat dan Pengambilan Keputusan oleh Lembaga Sertifikasi (UU No 20/2014)-daya saing, tidak memihak, transparansi dan keterbukaan



Dukungan/ pengawalan terhadap pekebun (Inpres 6/2019)



PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
1.	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	10	21
2.	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2	36
3.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	9	49
4.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA	6	36
5.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	3	9
6.	PENERAPAN TRANSPARANSI	6	18
7.	PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN	2	4
	JUMLAH	38	173



PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PEKEBUN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
1.	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	5	7
2.	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	11	17
3.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	2	3
	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA	-	-
	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-
4.	PENERAPAN TRANSPARANSI	2	5
5.	PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN	1	1
	JUMLAH	21	33



Terima kasih Sawit Indonesia, Aku Jadi Bisa Mengejar Mimpi

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian RI
Telp : (021) 7815380
Fax : (021) 7815486 - 7815586
Website : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

